

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERCERAIAN KARENA
FAKTOR PERSELINGKUHAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Sukoharjo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NYOMAN MER'SALA ISTI AYU

C100150008

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERCERAIAN KARENA FAKTOR
PERSELINGKUHAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

NYOMAN MER'SALA ISTI AYU

C100150008

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Rizka, S. Ag., M. H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERCERAIAN KARENA FAKTOR
PERSELINGKUHAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)**

**OLEH
NYOMAN MER'SALA ISTI AYU
C100150008**

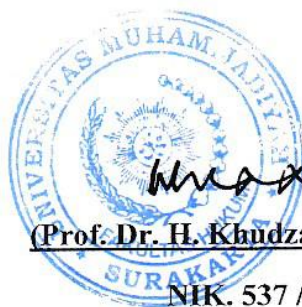
**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa 17 September 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Dr.Rizka,S.Ag.M.H**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Mutimatun Ni'ami,SH.,M.Hum**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Nuswardani.S.H.,S.SU**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M. Hum)

NIK. 537 / NIDN.0727085803


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 September 2019

Penulis



NYOMAN MER'SALA ISTI AYU

C100150008

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERCERAIAN KARENA FAKTOR
PERSELINGKUHAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Sukoharjo)**

Abstrak

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar hukum dalam proses penyelesaian putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tentang perkara perceraian karena faktor perselingkuhan dan untuk mengetahui kesesuaian putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No.196/PDT.G/2018/PA.Skh tentang perkara perceraian karena faktor perselingkuhan dengan Undang-undangan No 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan dasar hukum yang mendasari proses penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan putusan No. 196 / Pdt.G / 2018 / PA.Skh sudah diatur keabsahannya secara tegas dalam peraturan hukum, yaitu peraturan hukum yang bersifat umum. Secara yuridis putusan dan pertimbangan hukum di dalamnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata Kunci: perkawinan, dasar hukum perceraian, perselingkuhan.

Abstract

Marriage aims to create a happy and eternal family. Divorce can only be done if there are certain reasons and are done before a court hearing. This study aims to find out about the legal basis in the settlement process of the Sukoharjo Religious Court's decision regarding divorce cases due to the factor of infidelity and to determine the suitability of the Sukoharjo Religious Court's decision No.196 / PDT.G / 2018 / PA. Law No. 1, 1974. This research uses a juridical approach. This type of research uses normative legal research. The results showed the legal basis underlying the divorce case settlement process because of the affair of ruling No. 196 / Pdt.G / 2018 / PA.Skh has been legally stipulated in the rule of law, namely general legal regulations. Legally the verdict and legal considerations in it have been in accordance with the applicable laws and regulations and are not in conflict with the legal objectives specified in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords: marriage, legal basis for divorce, infidelity.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 *“ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan*

Ketuhanan Yang Maha Esa”(Hilman, 1990).Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia dan diharapkan untuk dapat melestarikan proses histori keberadaan manusia di dalam kehidupan dunia dengan melahirkan keturunan yang dari keturunan itu maka akan membentuk dan melahirkan keluarga,dan pada akhirnya keluarga adalah unit kecil sebagai bagian yang tidak terlepas dari kehidupan di dalam masyarakat (Rasjidi, 1991).

Perkawinan merupakan suatu keharusan untuk menjaga berbagai akses negative yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat,itulah sebabnya Rasulullah Muhammad saw pernah mengatakan bahwa perkawinan adalah sunnahku, barang siapa tidak melakukan perkawinan dia bukan golonganku(umatku) (Departemen Agama RI , 2007). Perlunya suatu payung hukum untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hak dan kewajiban suami dan istri dalam membina kelangsungan rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana asas atau prinsip perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Sudarsono mengatakan bahwa: *“Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”*.Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi,agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil”(Sudarsono, 2010). Islam menginginkan perkawinan itu kekal di antara suami isteri kecuali dengan sebab yang tidak dapat di elakkan yaitu dengan sebab maut salah seorang diantara mereka berdua.Itulah sebabnya dalam melakukan perkawinan, tidak disahkan perkawinan untuk sekedar bersenang-senang yang batas waktunya sementara.Namun demikian islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi pula tidak mempermudah perceraian (Latief,1982).

Persoalan demi persoalan yang dihadapi setiap hari, belum lagi ditambah dengan keunikan masing-masing individunya, sering menjadikan kehidupan perkawinan menjadi sulit dan hambar. Jika sudah demikian, maka kondisi itu semakin membuka peluang untuk timbulnya perselingkuhan di antara pasangan.Perselingkuhan seakan menjadi bom waktu bagi keutuhan sebuah keluarga yang sewaktu-waktu dapat meledak dan membinasakan keharmonisan

rumah tangga, tanpa pandang strata sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, jabatan, maupun status hukumnya. Perselingkuhan, dengan seks atau tanpa hubungan seks, meskipun jelas-jelas haram menurut agama dan dicap buruk oleh masyarakat, pada kenyataannya begitu mudah untuk ditemukan, bahkan untuk dilakukan.

Perselingkuhan tidak hanya memporakporandakan keharmonisan keluarga yang dibina dalam hitungan bulan dan tahun saja, namun tidak sedikit pula perselingkuhan menjadi momok penyakit yang menghancurkan biduk rumah tangga yang telah diarungi selama puluhan tahun lamanya, bahkan ada yang telah memiliki putra-putri dari hasil perkawinan mereka yang berusia dewasa, namun tetap saja perselingkuhan tersebut mampu menggoyahkan keharmonisan rumah tangga, dan akhirnya berakhir di meja perceraian. Perceraian yang diakibatkan karena pihak ketiga menurut asumsi peneliti adalah diakibatkan karena kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami dan istri berkewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain. Seharusnya suami dan istri dapat menjalin suatu hubungan yang baik satu sama lain. Akan tetapi karena kurangnya keharmonisan dan juga perhatian terhadap pasangan suami istri satu sama lain menyebabkan adanya pihak diluar dari rumah tangga yang mempengaruhi hubungan suami istri. Pihak dari luar rumah tangga tidak mesti seseorang yang menginginkan salah satu yakni suami atau istri (Widjaja, 1985).

Pengadilan Agama Sukoharjo pada Tahun 2018 telah menangani 41 kasus perceraian dengan faktor penyebab gangguan dari pihak ketiga sebagai alasan para pihak mengajukan perceraian, dan di antara 41 kasus tersebut, ditemukan 15 putusan perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian, satu putusan dari pihak suami yang mengajukan permohonan talak karena istrinya berselingkuh, dan satu putusan dari pihak istri yang menggugat cerai suaminya karena berselingkuh. Melihat perkara tersebut, dapat dikatakan bahwa perselingkuhan keluarga tidak hanya terjadi dari pihak suami, ada pula dari pihak istri yang terbukti selingkuh sehingga suaminya mengajukan permohonan talak terhadap istrinya (Departemen

Agama RI, 2007). Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudlarat yang lebih besar .Karena itu perceraian adalah pintu darurat perkawinan guna keselamatan bersama (Latief,1982).

Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan (Rofiq, 2013). Gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Negeri di daerah hukum suami yang memiliki tempat tinggal pokok pada saat mengajukan permohonan termasuk dalam 831 *reglemen* acara perdata atau tempat tinggal sebenarnya bila tidak memiliki tempat tinggal pokok. Jika pada saat mengajukan surat permohonan permohonan tersebut di atas suami tidak memiliki tempat tinggal pokok atau sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman isteri sebenarnya perceraian perceraian sekali-kali tidak dapat terjadi atas persetujuan bersama.Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan kata lain perceraian harus melalui pengadilan, tidak bisa tidak. Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan, harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan. Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan-alasan diperbolehkan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain yang susah untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang jauh lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang bisa membahayakan pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Hilman, 1990).

Melihat aturan di atas, alasan perselingkuhan tidak disebutkan di antara aturan-aturan diperbolehkannya perceraian, namun hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah memutuskan cerai terhadap perkara yang telah diajukan kepada pengadilan. Dengan demikian hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut harus benar-benar meyakini secara pasti mengenai bukti yang diberikan oleh pihak yang berperkara, di samping itu hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip Perundang-undangan yang berlaku, karena pada dasarnya peraturan tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian belum ada secara yuridis dan normatif, sehingga putusan hakim tidak hanya memenuhi keadilan bagi para pihak yang bersengketa, namun juga dapat memberikan pertanggung jawaban kepada negara sesuai hukum yang telah ditentukan, baik secara hukum nasional, maupun secara hukum Islam.

Dari fenomena yang terjadi di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO (Studi Kasus Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Skh)”**.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan *yuridis*. Pendekatan *yuridis* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum dalam proses Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tentang Perkara Perceraian karena Faktor Perselingkuhan

Dasar hukum dikabulkannya gugatan adalah terpenuhinya unsur-unsur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perzinahan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat dan perbuatan tergugat yang tidak memberi nafkah kepada penggugat serta antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kata perselingkuhan berasal dari kata “selingkuh”, mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang secara bahasa berarti “tidak berterus terang, tidak jujur, suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, curang dan cemburu”.

Menurut Wikipedia, perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Walaupun demikian, pengertian 'berselingkuh' dapat berbeda tergantung negara, agama, dan budaya pada zaman sekarang, istilah perselingkuhan digunakan juga untuk menyatakan hubungan yang tidak setia dalam pacaran.

Sedangkan di dalam masyarakat kita dewasa ini, perselingkuhan diartikan dengan kecurangan dalam hubungan cinta antara seseorang dengan pasangannya, dan biasanya perselingkuhan itu diikuti dengan perbuatan- perbuatan mendekati zina bahkan perzinahan itu sendiri, dengan selingkuhannya. Adapula masyarakat mengartikan Selingkuh berarti ketidak jujuran suami atau isteri dalam hubungan

bersuami isteri atau ikatan perkawinan, yang di masyarakat biasanya disebut dengan adanya PIL (pria idaman lain) atau WIL (wanita idaman lain).

Berdasarkan terpebuhinya unsur-unsur diperbolehkannya perceraian menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberikan putusan mengabulkan gugatan dari penggugat yaitu dikabulkannya perceraian antara penggugat dan tergugat dengan talak satu Ba'in Sughro. Berkaitan dengan biaya perkara, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

3.2 Kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 196/Pdt.G/2018/PA. Skh tentang Perkara Perceraian karena Faktor Perselingkuhan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 No. 9 Tahun 1975 yaitu: Salah satu pihak tersebut berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yangb sukar disebutkan, Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan lain yang sah atau karena hal lain dilur kemampuan, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai suami atau istri. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, putusan perceraian dengan factor perselingkuhan pada putusan nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Skh telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana unsur-unsur alasan diperbolehkannya perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi oleh uraian mengenai pokok perkara sehingga Majelis Hakim

memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan mengabulkan perceraian antara penggugat dan tergugat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dasar hukum yang mendasari proses penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan putusan No.196/Pdt.G/2018/Pa.Skh sudah diatur keabsahannya secara tegas dalam peraturan hukum, yaitu peraturan hukum yang bersifat umum. Peraturan hukum yang bersifat umum adalah yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri yang disini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 peraturan tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, peraturan untuk menyelesaikan perkara tertentu termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan antara orang-orang islam di bidang perkawinan, wasiat, hibah,wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam,yang merupakan kumpulan/himpunan materi Hukum Islam,terdiri atas kelompok materi hukum perkawinan, hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah dan hukum perwakafan.

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Skh tentang perceraian karena factor perselingkuhan menyatakan bahwa mengabulkan perceraian dengan talak satu Ba'in Sughro antara penggugat dan tergugat.Secara yuridis putusan dan pertimbangan hukum di dalamnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Dimana unsur-unsur alasan diperbolehkannya perceraian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi oleh uraian mengenai pokok perkara sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan mengabulkan perceraian antara penggugat dan tergugat.

4.2 Saran

Bagi pasangan suami isteri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan khususnya dalam perkara perceraian dan dalam berbagai hal lainnya, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Sehingga mampu untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut yaitu menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama agar bijaksana dalam menangani suatu perkara sehingga tidak pihak-pihak yang merasa dirugikan dan harus dapat memutus permohonan perceraian dengan memperhatikan alasan-alasan yang diajukan serta selalu mengupayakan upaya perdamaian mengingat bahwa putusnya perkawinan memiliki dampak yang begitu luas menyangkut kebahagiaan masing-masing pihak dan masa depan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut.

Kepada Pemerintah diharapkan mampu melihat alasan-alasan yang terjadi pada masyarakat yang mampu mengakibatkan perceraian. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang lebih baik dan bijaksana demi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2007). Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
- Djamil, Latief. (1982). Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hilman, Hadikusuma. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju
- Lili, Rasjidi. (1991). Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rofiq, Ahmad. (2013). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2010). Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta
- Widjaja, A.W. (1985). Individu Keluarga dan Masyarakat. Jakarta: Resindo